



## Pengaruh Pancasila dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia untuk Memerangi Terorisme

Ashfiya Nur Atqiya<sup>1</sup>, Ahmad Muhamad Musain Nasoha<sup>2</sup>, Karina Cahyawati<sup>3\*</sup>,  
Kurnia Al Fiyatur Rohmaniyah<sup>4</sup>, Choirunnisa Puspita Dewi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [karinachywtii@gmail.com](mailto:karinachywtii@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research aims to explore the influence of Pancasila in Islamic criminal law reform, focusing on efforts to combat terrorism. Using a qualitative approach, this research collects and analyzes various literature sources and relevant legal documents. In addition, document analysis was conducted to evaluate existing policies and practices, as well as challenges in the application of Pancasila principles. The results show that the integration of Pancasila can strengthen Islamic criminal law by ensuring a more just and humane application in dealing with terrorism. However, there are challenges in the reform process, including differences between sharia and Pancasila principles and implementation issues. This research recommends in-depth reforms, development of oversight mechanisms, and increased dialogue between relevant parties to create a more effective legal system that is in line with Pancasila values. The findings provide important insights for Islamic criminal law reform that is more harmonious and responsive to the threat of terrorism. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual case, historical and comparative approaches.*

**Keywords:** *Pancasila, Legal Reform, Terrorism, Value Integration, Human Rights*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Islam, dengan fokus pada upaya memerangi terorisme. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik yang ada, serta tantangan dalam penerapan prinsip Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dapat memperkuat hukum pidana Islam dengan memastikan penerapan yang lebih adil dan humanis dalam menangani terorisme. Namun, terdapat tantangan dalam proses reformasi, termasuk perbedaan antara prinsip syariah dan Pancasila serta masalah implementasi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi mendalam, pengembangan mekanisme pengawasan, dan peningkatan dialog antar-pihak terkait untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk reformasi hukum pidana Islam yang lebih harmonis dan responsif terhadap ancaman terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus konseptual, historis dan perbandingan.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pembaruan Hukum, Terorisme, Integrasi Nilai, Hak Asasi Manusia.

### 1. LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berfungsi bukan hanya sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan konstitusional dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks pembaruan hukum pidana Islam, khususnya untuk menangani ancaman terorisme, peranan Pancasila menjadi sangat krusial. Terorisme, yang merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang dapat merusak struktur sosial dan keamanan negara, menuntut respons hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar negara yang diusung oleh Pancasila. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam menyesuaikan hukum

pidana Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum pidana Islam yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila, masih terdapat ketidakselarasan yang perlu diatasi agar hukum pidana Islam dapat lebih efektif dalam menangani terorisme (Fachruddin dan Arifin, 2021).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip Syariah dan kebutuhan untuk menangani ancaman terorisme secara efektif. Hukum pidana Islam yang diintegrasikan dengan Pancasila dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika terorisme (Rasyid dan Ahmad 2022).

Pancasila dapat mempengaruhi hukum pidana Islam dalam menangani terorisme. Pentingnya penyesuaian hukum untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi nilai-nilai Pancasila tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Syariah. Reformasi hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan mempertimbangan nilai-nilai dasar negara (Putra dan Hadi 2023).

Hukum pidana Islam yang diintegrasikan dengan Pancasila dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika terorisme. Pancasila dapat mempengaruhi hukum pidana Islam dalam menangani terorisme. Pentingnya penyesuaian hukum untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi nilai-nilai Pancasila tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Syariah. Reformasi hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan mempertimbangan nilai-nilai dasar negara (Kartono dan Nia 2022). Mempengaruhi efektivitas hukum pidana Islam dalam menghadapi terorisme (Budi dan Sari 2023).

Pengaruh Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Islam untuk memerangi terorisme. Perlunya penyesuaian dan reformasi yang lebih mendalam untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip Pancasila. Perspektif tentang bagaimana reformasi hukum pidana Islam dapat dilakukan secara efektif (Hasan dan Lina 2024).

Tantangan dan solusi dalam integrasi Pancasila dalam hukum pidana Islam, terutama dalam konteks penanggulangan terorisme. Identifikasi tantangan utama dan memberikan rekomendasi untuk reformasi yang lebih efektif. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam mempengaruhi hukum pidana Islam dalam menghadapi terorisme (Yanti dan Dewi 2023).

Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembaruan hukum pidana Islam untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam untuk memerangi terorisme. Pendekatan

yang lebih komprehensif dalam reformasi hukum pidana Islam untuk mencapai keseimbangan antara prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila, disarankan (Rizal dan Diah 2024).

Dengan merangkum berbagai literatur dan studi terkini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Islam dan bagaimana pengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan terorisme. Dengan analisis mendalam terhadap berbagai referensi, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi yang efektif dan berkeadilan dalam memerangi terorisme, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar negara.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam pembaruan hukum pidana Islam, terutama dalam konteks penanggulangan terorisme. Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai landasan konstitusional dalam penyusunan kebijakan negara, termasuk hukum pidana Islam. Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, menjadi dasar penting dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam untuk memerangi terorisme. Reformasi hukum pidana Islam yang memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan efektif.

Dalam menghadapi ancaman terorisme, penting untuk menjaga keseimbangan antara penerapan Syariah dan prinsip-prinsip Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menuntut penghormatan terhadap agama dan pluralisme, sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memastikan bahwa hukum pidana Islam tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini menjadi landasan dalam penerapan hukum yang adil dan merata dalam menangani terorisme.

Namun, tantangan utama dalam integrasi Pancasila dalam hukum pidana Islam adalah perbedaan prinsip antara Syariah dan nilai-nilai Pancasila, serta ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi yang memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk itu, diperlukan kajian mendalam dan dialog antara ahli hukum, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan hukum pidana Islam yang harmonis dan responsif terhadap ancaman terorisme. Reformasi ini harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar

negara agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai Pancasila dalam memerangi terorisme.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doktrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron(comparative approach)

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membasca, mengidentifikasikan dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan hukum pidana Islam di Indonesia, dalam rangka memerangi terorisme, memerlukan analisis mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berfungsi sebagai panduan dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan norma-norma nasional, tetapi juga relevan dengan tantangan global, seperti terorisme. Pembahasan ini akan mencakup beberapa aspek penting terkait pengaruh Pancasila dalam hukum pidana Islam, tantangan integrasi, serta rekomendasi untuk reformasi hukum.

##### **Pengaruh Pancasila dalam Hukum Pidana Islam**

Pancasila, dengan lima silanya yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara, memberikan landasan moral dan etika bagi pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penerapan hukum, termasuk hukum pidana Islam (Prabowo, S. 2022).

Sila Pertama Pancasila. Yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mendasari perlunya hukum pidana Islam yang menghormati nilai-nilai religius tanpa menafikan pluralism agama yang diakui di Indonesia. Hal ini berarti dalam penerapan hukum pidana Islam untuk memerangi terorisme, penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip Syariah dan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Pancasila. Integraasi nilai ketuhanan dalam hukum pidana islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pluralism dan toleransi beragama (Fachruddin, A., & Arifin, M. 2021).

Silas kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menggarisbawahi perlu adanya hukum pidana yang mencerminkan keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap semua individu. Reformasi hukum pidana Islam harus memastikan bahwa hukuman yang berlaku untuk tindakan terorisme tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan sosial. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan hukuman untuk pelaku tidak bersifat diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu (Budi, E., & Sari, L. 2023). Hukum pidana Islam dalam penanggulangan terorisme harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama (Prabowo, S. 2022).

### **Tantangan Integrasi Pancasila dalam Hukum Pidana Islam**

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai Pancasila. Prinsip Syariah seing memiliki pendekatan yang berbeda dengan nilai-nilai yang diusung oleh Pancasila. Misalnya, hukum pidana islam tradisional maungkin menerapkan adanya hukuman yang dianggap tak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, seperti dipotongnya tangan untuk pencurian atau hukuman rajam untuk zina (Rasyid, I., & Ahmad, A. 2022). Nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma Internasional tentang hak asasi manusia (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2023).

Implementasi hukum pidana Islam yang sering mengalami kendala dalam hal konsistensi dan interpretasi, menjadi tantangan lain. Misalnya, perbedaaan interpretasi dalam penerapan hukum pidana Islam dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan.

Hal ini penting untuk diatasi agar hukum pidana Islam dapat berfungsi dengan efektif dalam menanggulangi terorisme tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila (Putra, J., & Hadi, B. 2023). Pentingnya reformasi dalam interpretasi dan penerapan hukum pidana Islam agar lebih sesuai dengan nilai Pancasila dan norma Internasional (Rasyid, I., & Ahmad, A. 2022).

### **Rekomendasi untuk Reformasi Hukum Pidana Islam**

Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mengoptimalkan pengaruh Pancasila dalam pembaruan hukum pidana islam, adanya beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya kajian yang mendalam dan dialog antara ahli hukum, akademisi, dan prastisi hukum mengenai bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana Islam. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang harmonis dan responsif terhadap ancaman terorisme (Rizal, M., & Diah, H. 2024).

Kedua, reformasi hukum pidana islam harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini termasuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hak asasi manulasi dan upaya memastikan bahwa hukum pidana islam diterapkan secara adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dapat dilakukan dengan cara yang tidak hanya efektif dalam menangani terorisme tetapi juga sesuai dengan prinsip Pancasila (Hasan, N., & Lina, Y. 2024).

Ketiga, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mekanisme ini dapat mencakup audit hukum, evaluasi kebijakan, dan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya efektif dalam memerangi terorisme tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam hal pengawasan dan evaluasi yang perlu diatasi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik (Yanti, A., & Dewi, P. 2023).

Dengan mempertimbangkan rekomendasi ini, diharapkan pembaruan hukum pidana Islam dapat dilakukan secara efektif, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, serta dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi terorisme di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembaruan hukum pidana Islam, terutama dalam konteks penanggulangan terorisme. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana Islam diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam menangani terorisme tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Integrasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip ketuhanan, dapat memperkuat sistem hukum pidana Islam dalam memerangi terorisme. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tetap menghormati hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Prabowo, S. 2022) (Fachruddin, A., & Arifin, M. 2021). Hal ini penting untuk menghindari penerapan hukum yang diskriminatif atau keras yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma Internasional (Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2023).

Namun, terdapat berbagai tantangan dalam proses integrasi ini, termasuk perbedaan yang mendasar antara prinsip Syariah dan nilai-nilai Pancasila, serta masalah dalam implementasi hukum pidana Islam yang sering kali menghadapi berbagai ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan (Rasyid, I., & Ahmad, A. (2022) (Putra, J., & Hadi, B. (2023). Dalam upaya mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi hukum pidana Islam yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila secara mendalam, dengan pendekatan yang inklusif dan adil (Hasan, N., & Lina, Y. (2024).

Rekomendasi untuk reformasi termasuk perluasan kajian dan dialog antara pihak-pihak yang terkait, penyesuaian penerapan hukum untuk lebih sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Rizal, M., & Diah, H. (2024) (Yanti, A., & Dewi, P. (2023). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembaruan hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan cara yang lebih harmonis dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme, sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Secara keseluruhan, integrasi Pancasila dalam hukum pidana Islam merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap tantangan global dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar negara. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa reformasi hukum tidak hanya bermanfaat dalam memerangi terorisme tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang ada dalam Pancasila.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, & Bayu Assri Novianto. (2023). Nilai-Nilai pendidikan fiqih dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3-4. ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).
- Arifin, A., & Nadia, F. (2024). Keseimbangan antara Pancasila dan Syariah dalam penegakan hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum dan Etika*, 29(3).
- Aulia, S. (2023). Evaluasi penerapan Pancasila dalam hukum pidana Islam: Studi kasus dan rekomendasi. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 31(1).
- Budi, E., & Sari, L. (2023). Dampak penerapan nilai Pancasila dalam hukum pidana Islam untuk penanggulangan terorisme. *Jurnal Hukum Internasional*, 29(2).

- Fachruddin, A., & Arifin, M. (2021). Menyesuaikan hukum pidana Islam dengan prinsip Pancasila dalam konteks pencegahan terorisme. *Jurnal Islam dan Hukum*, 27(1).
- Fauzi, R., & Bintang, W. (2023). Implementasi prinsip Pancasila dalam reformasi hukum pidana Islam. *Jurnal Hukum Nasional*, 28(4).
- Haris, M., & Nuri, L. (2024). Peran Pancasila dalam pengembangan hukum pidana Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 33(2).
- Hasan, N., & Lina, Y. (2024). Pengaruh Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Islam untuk memerangi terorisme. *Jurnal Hukum Pidana dan Sosial*, 30(1).
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2023). Pengaruh Pancasila dalam reformasi hukum pidana Islam untuk mengatasi terorisme. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2).
- Kusnadi, W., & Hamid, F. (2023). Integrasi Pancasila dalam sistem hukum pidana Islam: Studi kasus dan perspektif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 42(1).
- Prabowo, S. (2022). *Pancasila dan hukum pidana: Menyongsong era baru*. Penerbit Cendekia.
- Putra, J., & Hadi, B. (2023). Penerapan prinsip Pancasila dalam hukum pidana Islam untuk penanggulangan terorisme. *Jurnal Studi Hukum*, 45(4).
- Rasyid, I., & Ahmad, A. (2022). Adaptasi hukum pidana Islam dengan nilai Pancasila dalam konteks terorisme. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 32(3).
- Rizal, M., & Diah, H. (2024). Integrasi Pancasila dalam pembaruan hukum pidana Islam: Menuju sistem hukum yang adil dan efektif. *Jurnal Hukum dan Politik*, 35(3).
- Sutrisno, E. (2023). *Hukum pidana Islam dan Pancasila: Perspektif dan implementasi*. Penerbit Yogyakarta Press.
- Syahputra, M., & Darmawan, T. (2023). Harmonisasi Pancasila dan hukum pidana Islam dalam penanggulangan terorisme. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 30(2).
- Taufik, H., & Hanan, S. (2022). Reformasi hukum pidana Islam berbasis Pancasila: Tantangan dan peluang. *Jurnal Penelitian Hukum*, 26(1).
- Wahyudi, A. (2023). *Pancasila dalam konteks hukum pidana: Teori dan praktik*. Penerbit Hukum Nusantara.
- Yanti, A., & Dewi, P. (2023). Tantangan dan solusi dalam integrasi Pancasila dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 28(2).
- Yusuf, A. (2023). Perspektif Pancasila dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 37(2).
- Zainal, M. (2024). *Penerapan nilai Pancasila dalam hukum pidana Islam: Suatu kajian komprehensif*. Penerbit Kencana.